LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
2025



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026

DAFTAR ISI

			HAL
HALAMAN COVER			1
DAFTAR ISI			2
KATA PENGANTAR			3
BAB I	**PENDAHULUAN**		
	1.1	Latar Belakang	4
	1.2	Isu-isu Strategis	6
	1.3	Dukungan SDM, Sarpras dan Anggaran	9
	1.4	Sistematika Penulisan	13
	1.5	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	13
	1.6	Langkah Perbaikan yang Dilakukan Oleh Internal OPD Terkait	14
BAB II	**PERENCANAAN KINERJA**		
	2.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	16
	2.2	Strategi dan Arah Kebijakan	17
	2.3	Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025	19
	2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	20
	2.5	Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	21
BAB III	**AKUNTABILITAS KINERJA**		
	3.1	Capaian Kinerja	25
	3.2	Efisiensi Anggaran	39
	3.3	Inovasi	40
	3.4	Penghargaan	41
BAB IV	**PENUTUP**		
	4.1	Kesimpulan	42
	4.2	Rekomendasi	42
LAMPIRAN			
	Perjanjian Kinerja		
	RKT		

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2024-2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Semarang, Februari 2026

Pimpinan OPD

Slamet, AK

Pembina Utama

NIP. 19660215 198603 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah terbentuk pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tanggal 9 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. BPKAD Provinsi Jawa Tengah merupakan penyatuan perangkat daerah pelaksana fungsi pengelolaan keuangan daerah pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelola barangan milik daerah pada Bidang Aset Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. Adapun tugas pokok dan fungsi BPKAD Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2023 Tanggal 23 Juni 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

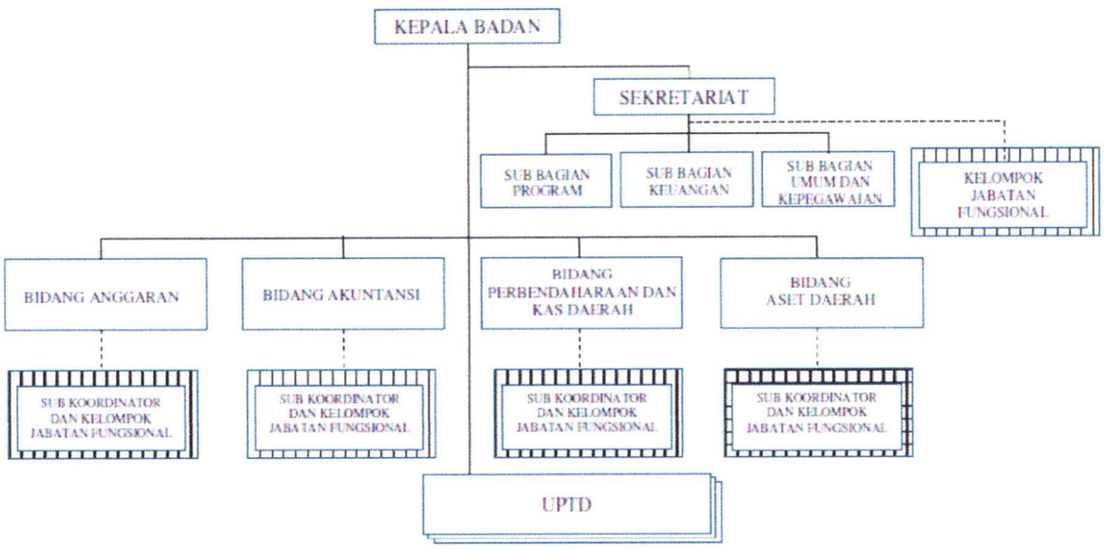
Mendasarkan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2023 tersebut, susunan organisasi BPKAD terdiri atas:

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris, terdiri:
    a. Subbagian Program;
    b. Subbagian Keuangan; dan
    c. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Anggaran, terdiri:
    a. Sub Koordinator Anggaran Bidang Pemerintahan;
    b. Sub Koordinator Anggaran Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
    c. Sub Koordinator Anggaran Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;
4. Bidang Akuntansi, terdiri:
    a. Sub Koordinator Akuntansi Bidang Pemerintahan;
    b. Sub Koordinator Akuntansi Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
    c. Sub Koordinator Akuntansi Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;
5. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri:
    a. Sub Koordinator Perbendaharaan Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;
    b. Sub Koordinator Perbendaharaan Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan

c. Sub Koordinator Pengelolaan Kas Daerah;

6. Bidang Aset Daerah, terdiri:
   a. Sub Koordinator Perencanaan Aset Daerah;
   b. Sub Koordinator Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah; dan
   c. Sub Koordinator Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), terdiri:
   a. UPTD Pemberdayaan Aset Daerah Kelas A; dan
   b. UPTD Pengelola Asrama Donohudan Kelas B.

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH



Gambar 1.1 Bagan Organisasi BPKAD Provinsi Jawa Tengah

BPKAD merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, BPKAD menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
e. pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan BPKAD;
f. pembinaan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengolahan data keuangan Daerah serta memfasilitasi dana transfer Pemerintah kepada pemerintah Kabupaten/Kota; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 ISU-ISU STRATEGIS

Mendasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, ditetapkan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 pada **"Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan, didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter"**. Adapun Prioritas pembangunan pada tahun 2025 ditujukan untuk:

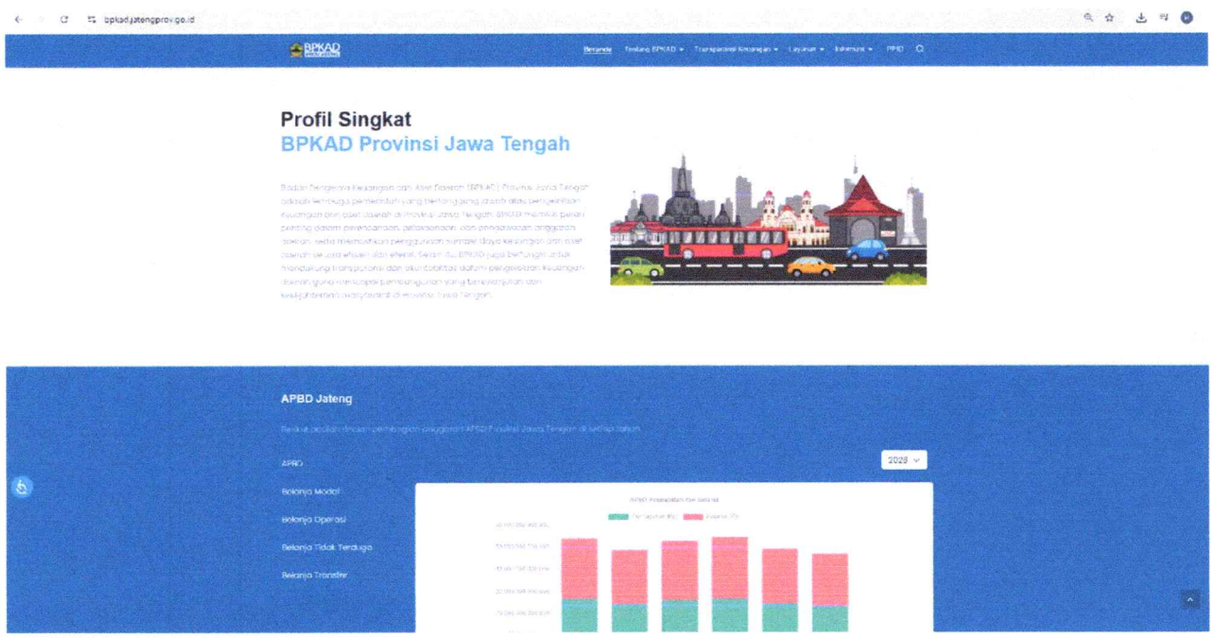
a. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
c. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; dan
d. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.

Terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif, BPKAD Provinsi Jawa Tengah mempunyai peran yang cukup vital dalam menjamin keterpaduan kebijakan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu melalui evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Tugas ini

merupakan representasi dari peran Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Melalui Evaluasi diharapkan kebijakan seperti Prioritas Pembangunan Nasional, Program Strategis Nasional (PSN), Kebijakan yang bersifat *earmarking,* Program Kegiatan yang merupakan hasil kesepakatan bersama Pemerintah Daerah dan Alokasi Anggaran yang bersifat *Top-down,* dapat lebih terjamin dan terlaksana di daerah Kabupaten/Kota.

BPKAD Provinsi Jawa Tengah, selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagai salah satu perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan, juga mempunyai tugas mengawal pelaksanaan penyelenggaraan haji melalui unit pelaksana perangkat daerah Asrama Donohudan. Peran penyediaan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan haji menjadi salah satu hal yang prioritas mengingat fasilitasi penyelenggaraan haji merupakan kewajiban Negara guna menjamin hak beragama setiap masyarakat.

Sarana Informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa sarana informasi portal berupa *website* dengan alamat akses http://bpkad.jatengprov.go.id/ dan Email: bpkad@jatengprov.go.id Sarana informasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan layanan informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 1.4 Tampilan Website Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Provinsi Jawa Tengah guna penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah di

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dihadapkan dengan beberapa tantangan. Adapun setiap permasalahan yang ada selanjutnya dirumuskan sebuah solusi yang tepat dalam rangka menjamin optimalisasi kinerja perangkat daerah.

Dengan membandingkan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal yang seharusnya, maka tantangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2025 dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

a. Adanya kebijakan "Satu Data Indonesia" sebagai implementasi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, yang mewajibkan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/kota untuk mengimplementasikan Sistem Pengelolaan Keuangan melalui SIPD;
b. Peningkatan pelayanan administrasi keuangan yang membutuhkan langkah percepatan, dan mengedapkan prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui kebijakan *cashless* dan *paperless* yang masih dilaksanakan secara bertahap yang harus didukung dengan sistem informasi;
c. Kebijakan penyetaraan fasilitas pelayanan haji pada Asrama Donohudan setingkat hotel, masih terkendala perencanaan sarana dan prasarana serta dukungan pendanaan sehingga belum bisa dicapai secara optimal mengingat pelaksanaannya dilakukan secara bertahap melihat urgensitas kebutuhan;
d. Belum adanya struktur organisasi yang secara khusus mewadahi fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, sehingga pelaksanaan pendampingan/fasilitasi pengelolaan keuangan daerah ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait evaluasi Raperda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, serta pembinaan lainnya seperti konsolidasi data keuangan, konsultasi, sosialisasi dan *monitoring* pengelolaan keuangan di wilayah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah belum dapat berjalan secara optimal.
e. Program peningkatan kapasitas aparatur/pengembangan pegawai khususnya terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pegawai sesuai ketentuan.
f. Konsistensi kebijakan *reward* dan *punishment* terhadap kinerja aparatur yang belum dilaksanakan secara optimal.
g. Pengamanan atas barang milik daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui program sertifikasi sebagai tindak lanjut kebijakan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (KORSUPGAH) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Jawa Tengah; dan

h. Optimalisasi perencanaan kebutuhan aset daerah dalam rangka peningkatan PAD melalui pemberdayaan dan pemanfaatan BMD.

Merujuk pada beberapa tantangan yang telah diuraikan di atas, permasalahan utama yang menjadi isu–isu strategis yang dihadapi pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2025 dalam rangka mewujudkan tujuan percepatan implementasi reformasi birokrasi secara optimal baik di tingkat Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota khususnya bidang pengelolaan Keuangan dan Aset daerah yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), baik pada tahapan penganggaran maupun tahapan penatausahaan berbasis *cashless* dan *paperless* pada seluruh perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
2. Optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui penatausahaan SIM Aset yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pemberdayaan, penghapusan dan pemindahtanganan BMD, termasuk didalamnya peningkatan kapasitas pengelola kebijakan BMD pada pengguna dan pengelola.

1.3 DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN

1.3.1 DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BPKAD Provinsi Jawa Tengah didukung dengan sumber daya yang cukup memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dukungan sumber daya secara garis besar terdiri dari sumber daya aparatur yang terkait kepegawaian dan sumber daya terkait sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai penunjang operasional di Lingkungan BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jumlah Pegawai di Lingkungan BPKAD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 162 pegawai dengan komposisi untuk Golongan II sebanyak 11 orang, Golongan III sebanyak 81 orang, Golongan IV sebanyak 21 orang, PPPK sebanyak 13 orang dan PPPK Paruh Waktu sebanyak 36 orang. Terkait dengan komposisi jumlah pegawai per golongan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Jumlah Pegawai Per Golongan berdasarkan Jenis Kelamin

NO	GOL	RUANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	IV	a	8	10	18
		b	1	1	2
		c	0	0	0
		d	0	0	0

		e	1	0	1
2	III	a	13	3	16
		b	9	14	23
		c	7	7	14
		d	18	10	28
3	II	a	2	1	3
		b	1	0	1
		c	1	0	1
		d	4	2	6
4	I	a	0	0	0
		b	0	0	0
		c	0	0	0
		d	0	0	0
5	PPPK	I	0	1	1
		III	1	0	1
		V	1	0	1
		VII	2	1	3
		IX	4	3	7
6	PPPK PW	-	25	11	36
	JUMLAH		**98**	**64**	**162**

Sumber : data kepegawaian BPKAD, per tanggal 15 Januari 2026

Tabel 1.2

Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Pasca Sarjana	20	23	43
2	Sarjana/ D.IV	42	37	79
3	Akademi/ D.III	5	1	6
4	SLTA	25	0	25
5	SMP	3	0	3
6	SD/ MI	4	2	6
	Jumlah	68	99	63

Sumber : data kepegawaian BPKAD, per tanggal 15 Januari 2026

Tabel 1.3

Komposisi Jumlah Pegawai Berdasar Jenis Jabatan

NO	GOLONGAN	STRUKTURAL	STAF	FUNGSIONAL	JUMLAH
1	I	0	0	0	0
2	II	0	11	0	11
3	III	3	64	14	81
4	IV	8	8	5	21
5	PPPK	0	9	4	13
6	PPPK PW	0	36	0	36
	TOTAL	**11**	**128**	**23**	**162**

Sumber : data kepegawaian BPKAD, per tanggal 15 Januari 2026

1.3.2 SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana pendukung operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat sebagaimana tabel 1.4 di bawah ini:

Tabel 1.4

Sarana Dan Prasarana Pendukung Operasional pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah

KODE	NAMA BARANG	TAHUN 2024		TAHUN 2025	
		JML	HARGA	JML	HARGA
1.3.1	Tanah	7	55.767.500.000	7	42.271.250.000
1.3.1.01	Tanah	7	55.767.500.000	7	42.271.250.000
1.3.2	Peralatan dan Mesin	7.954	51.598.798.734	8.150	54.764.061.135
1.3.2.01	Alat Besar	44	2.568.329.860	44	2.568.329.860
1.3.2.02	Alat Angkutan	118	11.855.622.138	119	13.053.372.138
1.3.2.04	Alat Pertanian	-	-	-	-
1.3.2.05	Alat Kantor Rumah Tangga	7.038	25.587.942.845	7.132	26.573.422.845
1.3.2.06	Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	191	3.141.770.374	203	3.484.844.075
1.3.2.07	Alat Kesehatan	-	-	-	-
1.3.2.10	Alat Komputer	563	8.445.133.517	592	8.964.092.217
1.3.2.18	Rambu-Rambu	-	-	60	120.000.000
1.3.3	Gedung Dan Bangunan	70	94.375.016.912	61	80.666.572.912
1.3.3.01	Bangunan Gedung	35	79.472.351.743	34	77.437.769.743
1.3.3.02	Monumen	1	846.935.000	1	846.935.000
1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/ Pasti	34	14.055.730.169	26	2.381.868.169
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	7	1.434.138.094	7	1.762.655.374
1.3.4.02	Bangunan air	1	597.128.465	1	597.128.465
1.3.4.03	Instalasi	5	382.553.273	5	711.070.553
1.3.4.04	Jaringan	1	454.456.356	1	454.456.356
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	44	9.178.000	44	9.178.000
1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	42	9.078.000	42	9.078.000
1.3.5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	2	100.000	2	100.000
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-		
1.3.6.01	Konstruksi dalam Pengerjaan				
TOTAL		**8.082**	**203.184.631.740**	**8.269**	**179.473.717.421**

Sumber: Aplikasi SIM ASET BPKAD, per tanggal 23 Januari 2026

1.3.3 DUKUNGAN ANGGARAN

Tabel 1.5

Tabel Dukungan Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**9.755.639.486.000**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**800.332.894.000**
4.1.2	Retribusi Daerah	8.521.080.000
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	690.155.713.000
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	101.656.101.000
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**8.792.120.753.000**
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	8.792.120.753.000
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**163.185.839.000**
4.3.1	Pendapatan Hibah	25.505.460.000
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	137.680.379.000
	Jumlah Pendapatan	**9.755.639.486.000**
5	**BELANJA DAERAH**	**7.165.588.763.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**59.634.567.000**
5.1.1	Belanja Pegawai	20.565.574.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	39.068.993.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**4.135.740.000**
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.544.400.000
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	401.340.000
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	190.000.000
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**25.000.000.000**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**7.076.818.456.000**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	4.494.697.452.000
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	2.582.121.004.000
	Jumlah Belanja	**7.165.588.763.000**
	Surplus/(Defisit)	**(2.590.050.723.000)**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**577.013.677.000**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**577.013.677.000**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**577.013.677.000**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	577.013.677.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**577.013.677.000**
	Pembiayaan Neto	**-**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**3.167.064.400.000**

Sumber: e-Penatausahaan GRMS TA. 2025

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) TA 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan tentang capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

Melampirkan dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

1.5 TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2024 dan 2025

Tabel 1.6

Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 dan 2025

No.	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Tahun 2024	
1	Menyelaraskan output dan target triwulan capaian kinerja pada dokumen Indikator Kinerja Indovisu (IKI) Tahun 2025 dengan e-controlling kinerja Tahun 2025 untuk optimalisasi evaluasi akuntabilitas kinerja.	Proses penyelarasan dilakukan untuk dokumen IKI Tahun 2026
1	**Tahun 2025** Menyusun dan menetapkan Surat Keputusan Tim Penilai sebagai dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment* sesuai dengan kriteria penghargaan pegawai/sub unit kerja yang dimiliki.	Selesai
2	Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengumpulan data kinerja.	Menunggu penandatangan

3	Mempublikasikan dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan pada *website* PPID secara berkala (minimal 5 tahun terakhir).	Selesai
4	Menyelesaikan rekomendasi atas LHE SAKIP Tahun 2024 yang belum ditindaklanjuti.	Selesai

Adapun berkaitan dengan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2025, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah memperoleh nilai 80,20 dengan perincian penilaian sebagai berikut :

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	22,80
2	Pengukuran Kinerja	30,00	22,80
3	Pelaporan Kinerja	15,00	13,35
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	21,25
Nilai Hasil Evaluasi		100,00	80,20

Dengan nilai hasil evaluasi sebesar **80,20** maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam kategori penilaian **"A" (Memuaskan)** dengan interprestasi terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil karena Pengukuran Kinerja telah dilakukan sampai ke level Eselon IV/Pengawas/Subkoordinator.

1.6 LANGKAH PERBAIKAN INTERNAL OPD

Tabel 1.7

Tindak Lanjut Rekomendasi LKjIP BPKAD Tahun 2025

No.	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Evaluasi berkala terkait pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan termasuk didalamnya agenda paket pekerjaan guna menjamin capaian indikator tujuan/sasaran sesuai target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan Renstra maupun Renja Perangkat Daerah.	Evaluasi berkala terkait pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan dilakukan setiap bulan dan tiap triwulanan melalui aplikasi *e-controlling* baik *e-controlling* APBD (Fisik dan Keuangan) maupun *e-controlling* kinerja.
2	Melakukan pengawasan/pengendalian internal dan peningkatan kompetensi SDM masing-masing unit kerja guna mengawal capaian indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.	Masing-masing unit kerja (Sekretariat/ bidang/UPAD) telah melakukan pengawasan/pengendalian internal serta meningkatkan kapasitas SDM masing-masing guna mengawal capaian indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.
3	Melakukan pengisian capaian *output* program/kegiatan/sub kegiatan pada sistem *e-controlling* maupun *e-controlling* Kinerja dengan cermat termasuk kendala	Pengisian capaian *output* program/kegiatan/sub kegiatan pada sistem *e-controlling* APBD maupun *e-controlling* Kinerja telah diupayakan

	yang dihadapi, sehingga laporan yang tersusun benar-benar menggambarkan realisasi fisik dan kinerja suatu kegiatan.	dengan cermat termasuk pengisian permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaian permasalahan tersebut.
4	Informasi kinerja yang disajikan dalam laporan ini harus digunakan dalam kebijakan perencanaan, pengukuran serta pelaksanaan program dan kegiatan organisasi guna menjamin peningkatan penilaian kinerja organisasi.	Informasi kinerja yang disajikan dalam laporan ini telah diupayakan untuk perbaikan perencanaan, pengukuran dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi serta peningkatan dan penilaian kinerja organisasi.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA OPD

Tujuan merupakan penyataan atas sesuatu yang hendak dicapai oleh Perangkat Daerah dalam hal ini BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam jangka waktu periode 2024-2026. Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam rekomendasi penyelesaian masalah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan komposisi kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan perlu dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan sekaligus menangani isu strategis. Tujuan harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pada setiap OPD. Serta tujuan merupakan *ultimate outcome* dari perangkat daerah yang akan dicapai dalam tiga tahun kedepan (2024-2026).

Adapun tujuan yang akan dicapai oleh BPKAD Provinsi Jawa Tengah:

a. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan Aset Daerah; dan
c. Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan tersebut diatas yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tiga tahun. Perumusan sasaran memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan dan akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun sasaran yang akan dicapai oleh BPKAD Provinsi Jawa Tengah:

a. Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan;
b. Meningkatnya jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah; dan
d. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.

Sehubungan dengan tujuan dan sasaran BPKAD Provinsi Jawa Tengah beserta indikatornya yang digunakan dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tujuan/Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja BPKAD Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian			Kondisi Akhir
					2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	%	97,75	97,91	98	98
		Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Keselarasan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	%	100	100	100	100
			Persentase Realisasi APBD	%	93,25	93,75	94	94
			Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun	%	100	100	100	100
2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Angka	76	76	76	76
		Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	1,28	1,29	1,3	1,28
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	81	81,10	81,20	81,20
3	Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan Aset Daerah		Indek Pengelolaan BMD	%	84,02	89,86	95,69	95,69
		Meningkatnya jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai ketentuan peraturan perundang-ndangan	Persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	100

Sumber: dokumen Renstra BPKAD 2024-2026

2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran BPKAD akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran BPKAD. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai.

Rumusan strategi yang disusun bersifat operasional dan dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan BPKAD yang menjadi tugas dan fungsinya. Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu

mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi BPKAD. Perumusan strategi dan arah kebijakan dituangkan dalam tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	%	97,91
		Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Keselarasan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	%	100
			Persentase Realisasi APBD	%	93,75
			Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun	%	100
2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Angka	76
		Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	1,29
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	81,10
3	Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan Aset Daerah		Indeks Pengelolaan BMD	%	89,86
		Meningkatnya jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai ketentuan peraturan perundang-ndangan	Persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai peraturan perundang-undangan	%	100

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan Sasaran	1. Melakukan penguatan sistem informasi pemerintah daerah dalam menunjang pengelolaan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel 2. Menjaga keuangan daerah dengan melakukan pemantauan penerimaan dan belanja daerah melalui pengendalian arus kas (*cashflow*) secara komprehensif	1. Implementasi SIPD 2. Optimalisasi penatausahaan keuangan berbasis *cashless* dan *paperless* 3. Penyesuaian dan peningkatan kapasitas atas perubahan regulasi pengelolaan keuangan
2	Meningkatnya pengelolaan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Meningkatkan tata kelola barang milik daerah	1. Optimalisasi SIM ASET (perencanaan, penatausahaan, pemberdayaan, penghapusan dan pemindahtanganan BMD)

			2. Penguatan kapasitas pengelolaan Barang Milik Daerah baik pada aset pengelola maupun pengguna
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Meningkatkan pengelolaan risiko perangkat daerah	1. Identifikasi, analisis, evaluasi, mitigasi, dan pelaporan risiko secara berkala untuk meminimalkan dampak negatif terhadap pencapaian tujuan pemerintah daerah.
4	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah	1. Peningkatan sarana prasarana penunjang pelayanan haji pada Asrama Donohudan

Sumber : Renstra BPKAD 2024-2026

2.3 STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

Untuk mendukung tercapainya visi dan misi Gubernur serta tujuan dan sasaran BPKAD, setiap tahunnya BPKAD membuat Rencana Kerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari dokumen Renstra BPKAD dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah periode 2024-2026. Berdasarkan dokumen Renja BPKAD Tahun 2025, untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut, BPKAD memiliki 3 (tiga) Program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Ketiga program tersebut didukung oleh 14 Kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah;
9. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah;
11. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;

12. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah; dan
14. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) dengan Gubernur untuk mewujudkan target kinerja dimaksud.

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja BPKAD Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Tujuan				
1	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase	97,91
Sasaran				
1.1	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Persentase keselarasan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	Persentase	100
		Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun	Persentase	100
		Persentase Realisasi APBD	Persentase	93,75
Tujuan				
2	Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Persentase	89,86
Sasaran				
2.1	Meningkatnya jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase	100
Tujuan				
3	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Angka	76
Sasaran				
3.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	81,1
3.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	1,29

Sumber: dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan TA 2025

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka pada tahun 2025 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan 1 (satu) program rutin dengan 7 (tujuh) kegiatan serta 2 (dua) program reguler untuk menunjang bidang keuangan dan aset melalui 7 (tujuh) kegiatan yang dibiayai melalui APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 sejumlah Rp7.165.588.763.000,00 (Tujuh trilyun seratus enam puluh lima milyar lima ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang diuraikan pada tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4

Program/Kegiatan dan Anggaran BPKAD

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	97,91%	Rp7.115.218.695.000,00
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	89,86%	Rp4.757.454.000,00
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	76	Rp45.612.614.000,00

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan TA 2025

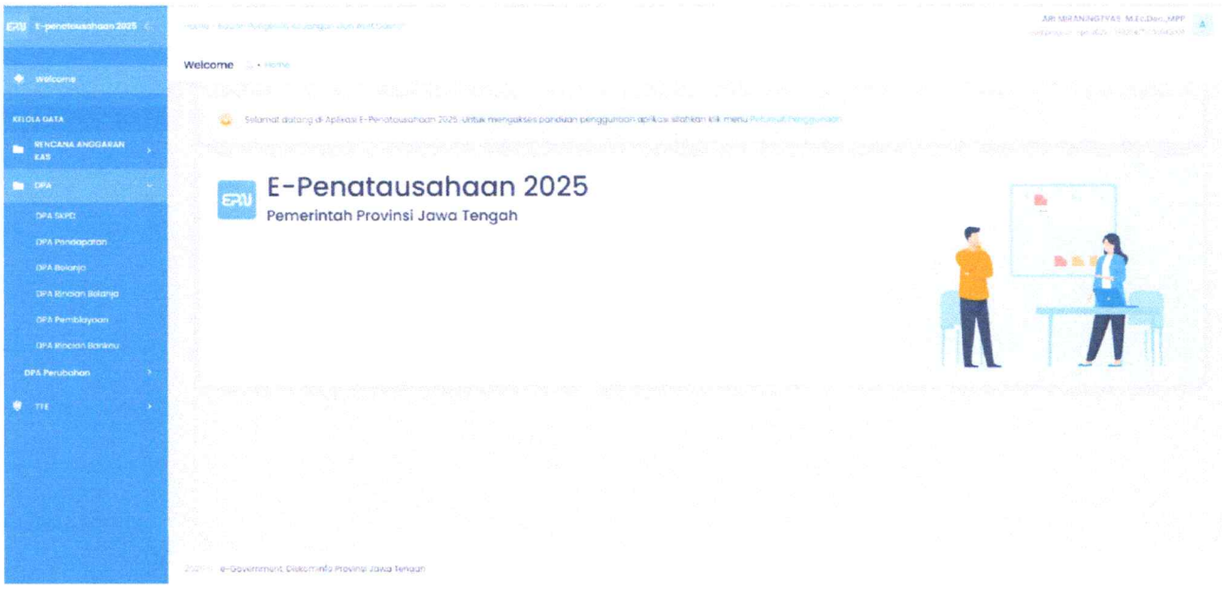
2.5 INSTRUMEN PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA

Untuk mendukung pengukuran capaian kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan, utamanya BPKAD menggunakan aplikasi *e-controlling* dari GRMS dimana untuk capaian kinerja diisikan dan dipantau tiap triwulanan pada *e-controlling* kinerja dan tiap bulan untuk *e-controlling* APBD. Adapun teknis pengumpulan data dilakukan dengan rapat pengendalian tiap bulannya yang dipimpin oleh Kepala/Sekretaris perangkat daerah dengan menghadirkan para Pelaksana Kegiatan/PPTK masing-masing bidang/unit kerja.

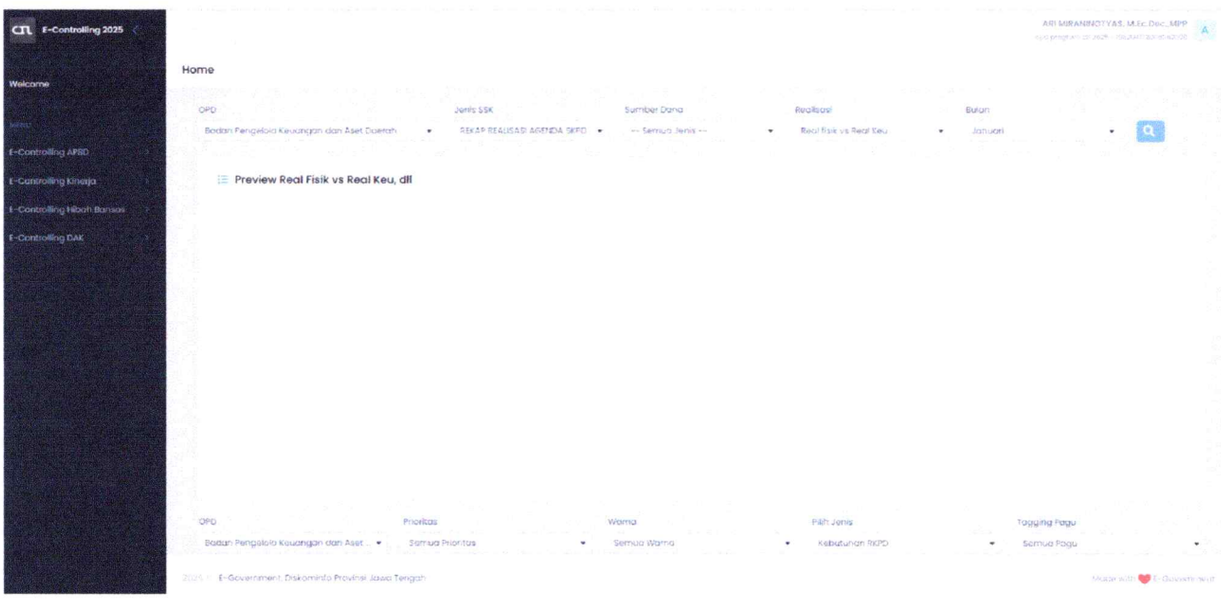
Selain itu, guna peningkatan tata kelola pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, BPKAD juga mengimplementasikan output/keluaran data pada system e-penatausahaan GRMS, e-Bantuan dan Sistem Informasi Manajamen Aset (SIM Aset) guna mengisi data di e-controlling kinerja.

Gambar 2.1

Tampilan Sistem Pengumpulan Data Kinerja pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah

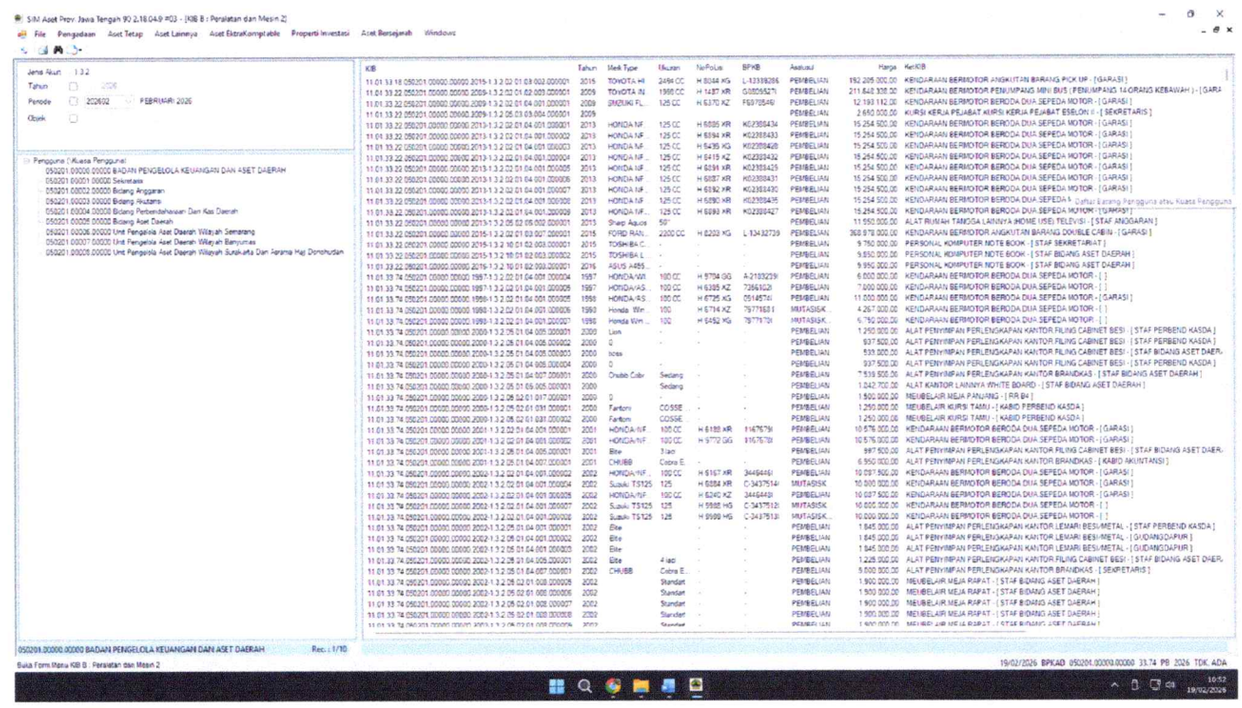


Sumber : e-Penatausahaan



Sumber : e controlling 2025

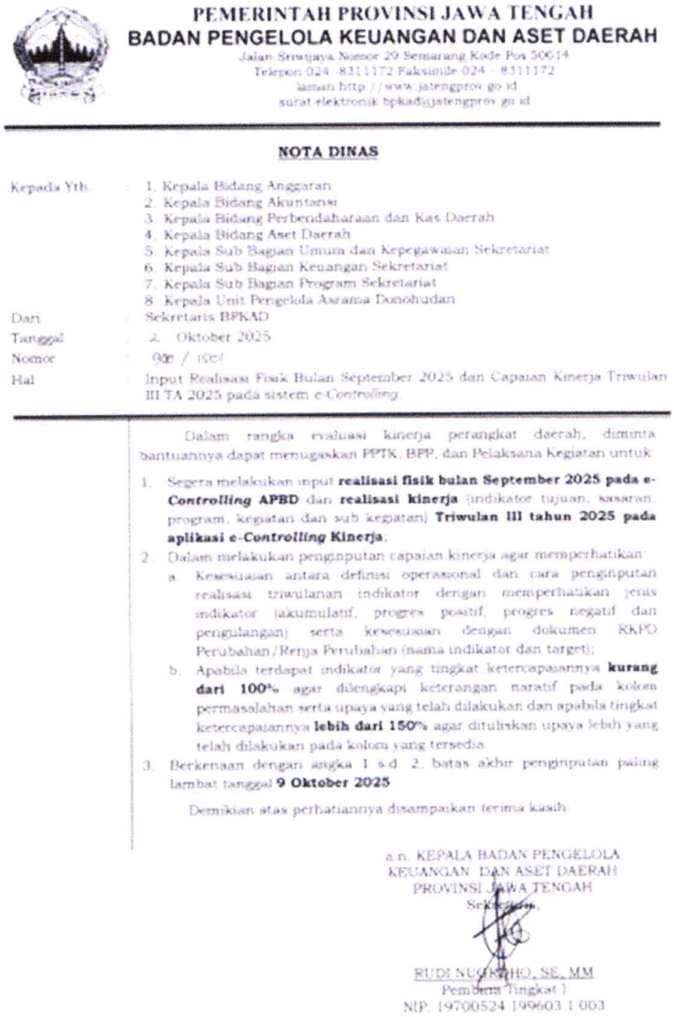




Sumber : SIM ASET 2025

Gambar 2.2

Contoh Edaran Pengendalian Tahun 2025 di BPKAD



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614
Telepon 024 - 8311172 Faksimile 024 - 8311172
laman http://www.jatengprov.go.id
surat elektronik bpkadjatengprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth. : 1. Kepala Bidang Anggaran
2. Kepala Bidang Akuntansi
3. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
4. Kepala Bidang Aset Daerah
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat
6. Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat
7. Kepala Sub Bagian Program Sekretariat
8. Kepala Unit Pengelola Asrama Donohudan

Dari : Sekretaris BPKAD
Tanggal : 2 Oktober 2025
Nomor : 900 / 1004
Hal : Input Realisasi Fisik Bulan September 2025 dan Capaian Kinerja Triwulan III TA 2025 pada sistem e-*Controlling*

Dalam rangka evaluasi kinerja perangkat daerah, diminta bantuannya dapat menugaskan PPTK, BPP, dan Pelaksana Kegiatan untuk:

1. Segera melakukan input **realisasi fisik bulan September 2025 pada e-*Controlling* APBD** dan **realisasi kinerja** (indikator tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan) **Triwulan III tahun 2025 pada aplikasi e-*Controlling* Kinerja**;
2. Dalam melakukan penginputan capaian kinerja agar memperhatikan:
   a. Kesesuaian antara definisi operasional dan cara penginputan realisasi triwulanan indikator dengan memperhatikan jenis indikator (akumulatif, progres positif, progres negatif dan pengulangan) serta kesesuaian dengan dokumen RKPD Perubahan/Renja Perubahan (nama indikator dan target);
   b. Apabila terdapat indikator yang tingkat ketercapaiannya **kurang dari 100%** agar dilengkapi keterangan naratif pada kolom permasalahan serta upaya yang telah dilakukan dan apabila tingkat ketercapaiannya **lebih dari 150%** agar dituliskan upaya lebih yang telah dilakukan pada kolom yang tersedia.
3. Berkenaan dengan angka 1 s.d. 2, batas akhir penginputan paling lambat tanggal **9 Oktober 2025**

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n. KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Sekretaris,

RUDI NUGROHO, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19700524 199603 1 003

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana direncanakan dalam jangka menengah, maka Penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategis, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	≥ 91%	Sangat Tinggi
2.	76% - 90,99%	Tinggi
3.	66% sampai dengan 75,99%	Sedang
4.	51% sampai dengan 65,99%	Rendah
5.	< 50,99%	Sangat Rendah

Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran Perangkat daerah, pada tabel 3.2 memuat Capaian Kinerja BPKAD Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja BPKAD Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	2025			Target Akhir RPD
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Persentase realisasi APBD	%	93,75	94,61	100,92	94
			Persentase keselarasan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	%	100	100	100	100
			Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun	%	100	100	100	100
2	Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan Aset Daerah	Meningkatnya jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai	Persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	2025			Target Akhir RPD
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
		ketentuan peraturan perundang-undangan						
3	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	81,1	85,5	105,43	81,2
		Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	1,29	2,87	222,48	1,30

Penilaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan melalui analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Kinerja BPKAD Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah/ Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Persentase realisasi APBD	93,75	94,61	100,92	Sangat Tinggi	e *controlling* kinerja BPKAD
		Persentase keselarasan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	100	100	100	Sangat Tinggi	e *controlling* kinerja BPKAD
		Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun	100	100	100	Sangat Tinggi	e *controlling* kinerja BPKAD
2	Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan Aset Daerah/ Meningkatnya	Persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai	100	100	100	Sangat Tinggi	e *controlling* kinerja BPKAD

No	Tujuan/Sasaran	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
	jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	peraturan perundang-undangan					
3	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah/ Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,1	85,5	105,43	Sangat Tinggi	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat BPKAD Semester II Tahun 2025
4	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah/ Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	1,29	2,87	222,48	Sangat Tinggi	LHE SPIP atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegritas Tahun 2025 pada BPKAD Nomor 700.1.2.7/1355/PERENCANAAN/2025 tanggal 20 Oktober 2025

Berdasarkan tabel 3.3, semua indikator kinerja dari tujuan dan sasaran BPKAD termasuk ke dalam kategori "Sangat Tinggi" dengan 3 (tiga) indikator kinerja tercapai 100% dan 3 (tiga) indikator kinerja tercapai lebih dari 100%. Ketiga indikator kinerja yang tercapai lebih dari 100% adalah Persentase realisasi APBD sebesar 100,92%, Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 105,43% dan Indeks Manajemen Risiko sebesar 222,48%. Capaian indikator kinerja Indeks Manajemen Risiko yang ekstrem tersebut akibat salah penargetan di Renstra BPKAD 2024-2026.

2. Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun

lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun)

Berdasarkan tabel 3.4 di bawah, secara keseluruhan capaian indikator kinerja BPKAD mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 dan 2025, BPKAD menetapkan indikator tujuan dan sasaran baru sesuai dengan dokumen perencanaan Renstra tahun 2024-2026 dengan 6 (enam) indikator kinerja sesuai yang tersebut di dalam tabel 3.4.

Indikator kinerja yang mengalami peningkatan adalah Persentase realisasi APBD yang pada tahun 2025 tercapai 100,92% meningkat 0,92% dari capaian tahun 2024 sebesar 100%, Nilai Kepuasan Masyarakat yang pada tahun 2025 tercapai 105,43% meningkat 3,58% dari capaian tahun 2024 sebesar 101,85%, dan Indeks Manajemen Risiko yang pada tahun 2025 tercapai 222,48% meningkat 112,48% dari capaian tahun 2024 sebesar 110%.

Tabel 3.4
Capaian Kinerja BPKAD Tahun 2023-2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	2023			2024			2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundang-an	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundangan	100%	100%	100	-	-	-	-	-	-
	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Persentase realisasi APBD	-	-	-	93,25	93,25	100	93,75	94,61	100,92
			Persentase keselarasan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	-	-	-	100	100	100	100	100	100
			Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun	-	-	-	100	100	100	100	100	100
2	Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Barang Milik Daerah	Terwujudnya Manajemen dan Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Tata Kelola barang milik daerah sesuai kaidah perundangan	72,5%	68%	93,79	-	-	-	-	-	-
	Meningkatkan Tata Kelola	Meningkat-nya jumlah perangkat	Persentase jumlah perangkat	-	-	-	100	100	100	100	100	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	2023			2024			2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Pengelolaan Aset Daerah	daerah yang mengelola aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	daerah yang mengelola aset sesuai peraturan perundang-undangan									
3	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Meningkat-nya kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	80	81,50	101,88	81	82,5	101,85	81,1	85,5	105,43
		Meningkat-nya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	77,65	97,06	-	-	-	-	-	-
	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah	Meningkat-nya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	-	-	-	2,60	2,86	110,00	1,29	2,87	222,48

Sumber: e controlling GRMS

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.5

Tingkat Kemajuan Capaian Kinerja BPKAD Tahun 2025 terhadap Target Akhir

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah/Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Persentase realisasi APBD	94,61	94	100,65
		Persentase keselarasan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	100	100	100
		Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun	100	100	100

2	Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan Aset Daerah/ Meningkatnya jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai peraturan perundang-undangan	100	100	100
3	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah/Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,5	81,2	105,30
4	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah/Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	2,87	1,30	220,77

Tabel 3.5 menunjukkan bahwa capaian masing-masing indikator kinerja terhadap Target Akhir Tahun 2026 sudah tercapai, lebih baik dari target akhir Tahun 2026.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.6 menunjukkan analisis keberhasilan/kegagalan dan solusi yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Berdasarkan tabel tersebut, 3 (tiga) indikator kinerja berhasil tercapai 100% dan 3 (tiga) indikator kinerja BPKAD yang capaian indikator kinerjanya berhasil melampaui 100%.

Tabel 3.6

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja BPKAD Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Persentase realisasi APBD	93,75	94,61	100,92	Melakukan pemantauan realisasi Pendapatan dan Belanja perangkat daerah melalui rekonsiliasi, koordinasi dan sosialisasi, peningkatan kualitas laporan keuangan melalui skema manajemen kas daerah.	
			Persentase keselarasan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	100	100	100,00	Melakukan koordinasi dan sosialisasi pedoman penyusunan APBD serta bimtek/asistensi kepada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.	
			Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun	100	100	100,00	Melakukan koordinasi dan bimtek/ asistensi kepada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.	
2	Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan Aset Daerah	Meningkatnya jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai peraturan perundang-undangan	100	100	100,00	Pendampingan kepada Perangkat Daerah terkait pengelolaan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melakukan upaya pengamanan aset	
3	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	1,29	2,87	222,48	melakukan perbaikan dokumen manajemen risiko, monitoring dan evaluasi yang terus menerus	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	birokrasi di perangkat daerah							
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,1	85,5	105,43	Melakukan survey kepuasan masyarakat tiap semester, implementasi tindak lanjut/perbaikan pada unsur /jenis pelayanan yang bernilai rendah, komitmen Pimpinan dan penyelenggara layanan dalam memberikan pelayanan terbaik, optimalisasi berbagai kanal pengaduan, apresiasi/penghargaan/reward diberikan kepda pegawai berkinerja terbaik, sanksi/punishment diberikan kepada pegawai berkinerja buruk dan/atau yang melanggar norma-norma etika	

Sumber: *e controlling*, BPKAD, Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

   Dalam melakukan perhitungan tingkat efisiensi, BPKAD melakukan perhitungan dengan membandingkan nilai capaian indikator kinerja dengan nilai capaian anggarannya. Apabila hasil perhitungan tersebut lebih besar dari 1 (satu) maka tingkat efisiensinya tinggi, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan tabel 3.7, kelima indikator kinerja dari tujuan dan sasaran strategis BPKAD terhitung semuanya memiliki tingkat efisiensi yang tinggi dimana hasil penilaian indikator kinerja memiliki nilai di atas 1 (satu) dengan realisasi anggaran yang rata-rata di atas 90%, sehingga BPKAD mampu mencapai indikator kinerja dengan kategori sangat tinggi (≥ 91%).

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

   Berdasarkan tabel 3.8, program dan kegiatan yang terdapat di BPKAD telah menunjang tujuan dan sasaran strategis BPKAD, terlihat dari semua capaian program dan kegiatan di BPKAD telah mencapai 100% dan menunjang pencapaian kinerja BPKAD.

Tabel 3.7

Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya BPKAD Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Uraian Indikator Kinerja	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Persentase realisasi APBD	93,75	94,61	100,92	1.867.041.000	1.590.645.125	85,20	1,18
			Persentase keselarasan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	100	100	100	7.110.038.292.000	6.604.013.944.966	92,88	1,08
			Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun	100	100	100	4.147.033.000	4.081.418.780	98,42	1,02

No	Tujuan	Sasaran	Uraian Indikator Kinerja	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
2	Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan Aset Daerah	Meningkatnya jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai peraturan perundang-undangan	100	100	100	4.757.454.000	4.646.002.650	97,66	1,02
3	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	1,29	2,87	222,48	383.091.000	349.452.300	91,22	2,44
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,1	85,5	105,43	44.778.943.000	42.277.757.355	94,41	1,12

Sumber: *e controlling* 2025

Tabel 3.8
Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

No	Tujuan	Indikator kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kualitas pengelolaan keuangan daerah	100,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase evaluasi APBD kabupaten/ kota tepat waktu	100,00	Menunjang
					Persentase belanja transfer dan belanja tidak terduga yang tersusun tepat waktu	100,00	Menunjang
					Persentase penetapan APBD tepat waktu	100,00	Menunjang
					Persentase penyampaian LKPD tepat waktu	100,00	Menunjang
					Persentase penyusunan dokumen manajemen kas	100,00	Menunjang
				Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	100,00	Menunjang
				Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Dokumen Belanja transfer dan BTT yang tersusun	100,00	Menunjang
				Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Penerimaan yang disusun	100,00	Menunjang
					Tersusunnya Dokumen laporan Keuangan Pengeluaran Yang Disusun	100,00	Menunjang
					Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Yang Disusun	100,00	Menunjang
				Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	100,00	Menunjang
					Tersusunya Dokumen Rencana Anggaran Kabupaten/Kota dan	100,00	Menunjang

					Perangkat Daerah Provinsi yang dilakukan Pembinaan.		
					Tersusunnya Dokumen Rencana Perubahan Anggaran Daerah yang Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	100,00	Menunjang
				Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas	100,00	Menunjang
2	Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	100,00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penyampaian laporan barang milik daerah (BMD) tepat waktu dan berkualitas baik	100,00	Menunjang
					Persentase penyampaian rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD)/rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMD) tepat waktu	100,00	Menunjang
					Persentase pengamanan barang milik daerah (BMD) secara fisik dan yuridis/sertifikasi	100,00	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya jumlah aset yang teramankan	100,00	Menunjang
					Terfasilitasinya penyelesaian kasus/sengketa Aset Daerah	100,00	Menunjang
					Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu	100,00	Menunjang
					Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan	100,00	Menunjang
3	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	99,04	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100,00	Menunjang
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100,00	Menunjang

				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	100,00	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	100,00	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100,00	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100,00	Menunjang
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	100,00	Menunjang
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	100,00	Menunjang
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	100,00	Menunjang

Sumber: *e controlling* 2025

3.2 EFISIENSI ANGGARAN

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja

Program/Kegiatan		Anggaran	Realisasi	%
(1)		(2)	(3)	(4)
Program Pengelolaan Keuangan Daerah		**7.116.052.366.000**	**6.609.686.008.871**	**92,88**
1	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	833.671.000	610.562.350	73,24
2	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	7.101.818.456.000	6.596.187.269.941	92,88
3	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	7.386.165.000	7.216.112.675	97,70
4	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	4.147.033.000	4.081.418.780	98,42
5	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.306.519.000	1.150.390.775	94,51
6	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	560.522.000	440.254.350	78,54
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		**4.757.454.000**	**4.646.002.650**	**97,66**
1	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.757.454.000	4.646.002.650	97,66
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		**44.778.943.000**	**42.627.209.655**	**95,19**
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	383.091.000	349.452.300	91,22
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.362.467.000	21.306.024.619	95,28
3	Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah	62.810.000	48.284.000	76,87
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.328.777.000	3.262.688.997	98,01
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.178.000.000	1.168.833.200	99,22

Program/Kegiatan		Anggaran	Realisasi	%
(1)		(2)	(3)	(4)
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.427.718.000	7.587.110.530	90,03
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.036.080.000	8.904.816.009	98,55
Jumlah		**7.165.588.763.000**	**6.656.959.221.176**	**92,90**

Sumber: *e controlling* GRMS

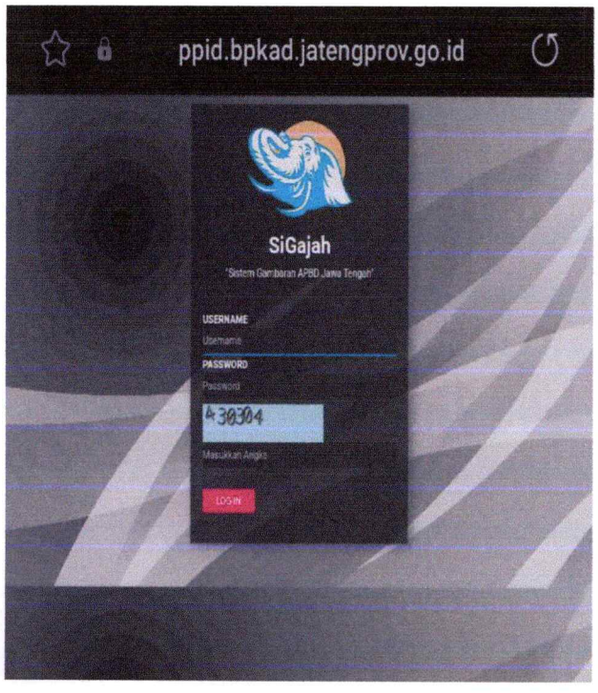
Berdasarkan tabel 3.9 dimaksud, rata-rata realisasi anggaran untuk program/kegiatan BPKAD sebesar 92,90%, tertinggi pada realisasi anggaran Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terealisasi 99,22% sedangkan realisasi terendah adalah Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota yang anggarannya terserap 73,24% karena pengalihan *leading sector* penyusunan pengukuran IPKD kepada Badan Riset dan Inovasi Daerah Prov. Jateng sesuai Surat Sekda Prov. Jateng Nomor S/900.1/130/2025 tanggal 30 November 2025 hal Penyusunan IPKD, sehingga secara akumulatif terjadi efisiensi anggaran pada BPKAD sebesar Rp.508.629.541.824,00 atau 7,10%.

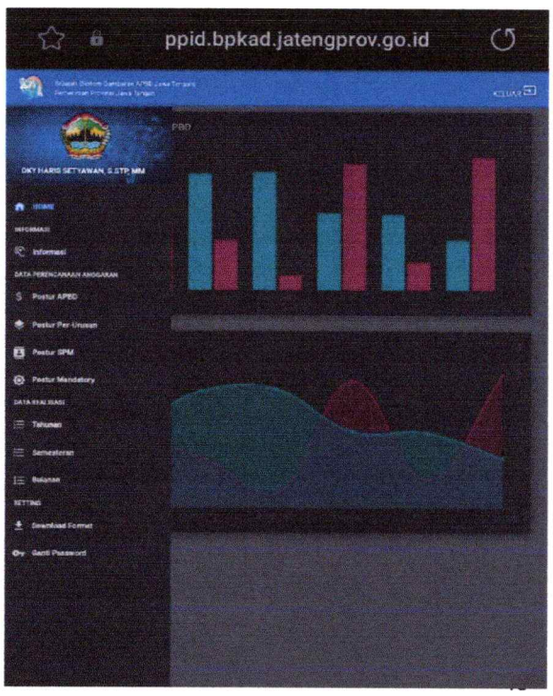
3.3 INOVASI

Pada tahun anggaran 2025, BPKAD menyempurnakan aplikasi SiGAJAH atau Sistem Gambaran APBD Se Jawa Tengah untuk mempermudah entitas dan para stakeholder BPKAD Provinsi Jawa Tengah memantau data keuangan daerah dan realisasi APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Gambar 3.1

Aplikasi SIGAJAH





3.4 PENGHARGAAN

BPKAD Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan dari dari PT Taspen (Persero) atas dukungan sepenuhnya secara aktif dalam ketepatan penyetoran IWP 8% JKK dan JKM, dan Pemda Terbaik Tahunan 2025 atas Ketepatan Penyetoran JKK dan JKM.

Gambar 3.2

Piagam Penghargaan dari PT Taspen (Persero)





BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan analisa pada bab sebelumnya, rata-rata capaian kinerja keenam indikator kinerja tujuan dan sasaran BPKAD adalah sebesar 121,47%, semua indikator kinerja tercapai 100% dan capaian tertinggi ada pada indikator kinerja Indeks Manajemen Risiko akibat kesalahan pencantuman target indikator kinerja pada Renstra BPKAD Tahun 2024-2026. Terhadap capaian target akhir Renstra di tahun 2026, seluruh indikator kinerja optimis akan tercapai.

Capaian realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung indikator kinerja tujuan dan sasaran BPKAD telah optimal dan menunjang capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran. Capaian indikator kinerja dibandingkan dengan anggaran yang disediakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran BPKAD memiliki tingkat efisiensi sebesar 7,10% atau sebesar Rp.508.629.541.824,00 dari anggaran BPKAD sebesar Rp.7.165.588.763.000,00. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program-program yang dilaksanakan pada tahun ini dapat mendukung terselesaikannya isu strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

4.2 REKOMENDASI

Melihat analisa LKjIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, meskipun capaian indikator kinerja telah termasuk kategori Sangat Baik, namun dalam rangka meningkatkan kinerja perangkat daerah maka diambil langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan penggunaan transaksi digital dalam mekanisme pembayaran dalam transaksi keuangan pemerintah daerah baik melalui Kartu Kredit Pemerintah Daerah maupun *Cash Management System*;
2. Mengembangkan sistem informasi barang milik daerah untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah;
3. Mengoptimalkan peran Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dalam proses pengambilan keputusan pemenuhan kebutuhan barang milik daerah; dan

4. Meningkatkan peran OPD dalam rangka pengamanan barang milik daerah dengan mendorong pengalokasian anggaran pengamanan barang milik daerah pada masing-masing OPD.

Dengan demikian perlu perhatian terhadap hal-hal tersebut di atas, dan diharapkan terjadi penguatan konsistensi upaya pencapaian rencana strategis dan peningkatan kualitas capaian hasil kinerja yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian Tujuan/Sasaran/Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada khususnya serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada umumnya.

KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

SLAMET, AK
Pembina Utama
NIP. 19660215 198603 1 001

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Sriwijaya Nomor 29 Tegalsari, Kec. Candisari, Semarang Kode Pos 50614
Telepon 024 -8311174 Faksimile 024 – 8311172 laman http: // www.jatengprov.go.id
surat elektronik bpkad@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : SLAMET, AK
Jabatan : Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. NANA SUDJANA, MM
Jabatan : Pj. Gubernur Jawa Tengah.

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 10 Januari 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH	KEPALA BPKAD PROVINSI JAWA TENGAH
Drs. NANA SUDJANA, MM	SLAMET, AK
	Pembina Utama Madya
	NIP.19660215 198603 1 001

	perangkat daerah		
Sasaran			
3.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,1 (angka)
3.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	1,29 (angka)

No	Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.	7.315.659.156.000,00	APBD
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp.	5.365.000.000,00	APBD
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	52.431.032.000,00	APBD

Semarang, 10 Januari 2025

Pihak Kedua,
Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

Drs. NANA SUDJANA, MM

Pihak Pertama,
KEPALA BPKAD PROVINSI JAWA TENGAH

SLAMET, AK
Pembina Utama Madya
NIP.19660215 198603 1 001

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Sriwijaya Nomor 29 Tegalsari, Kec. Candisari, Semarang Kode Pos 50614
Telepon 024 -8311174 Faksimile 024 – 8311172 laman http: // www.jatengprov.go.id
surat elektronik bpkad@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : Slamet, Ak.
Jabatan : Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K
Jabatan : Gubernur Jawa Tengah.

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, September 2025

Pihak Kedua, GUBERNUR JAWA TENGAH	Pihak Pertama, KEPALA BPKAD PROVINSI JAWA TENGAH
Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K	Slamet, Ak. Pembina Utama Madya NIP.19660215 198603 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan			
1	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	97,91%
Sasaran			
1.1	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Persentase keselarasan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	100%
		Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun	100%
		Persentase Realisasi APBD	93,75%
Tujuan			
2	Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	89,86%
Sasaran			
2.1	Meningkatnya jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai peraturan perundang-undangan	100%
Tujuan			
3	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	76%

	perangkat daerah		
Sasaran			
3.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,1 (angka)
3.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	1,29 (angka)

No	Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.	7.115.218.695.000,00	APBD
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp.	4.757.454.000,00	APBD
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	45.612.614.000,00	APBD

Semarang, September 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR JAWA TENGAH

Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K

Pihak Pertama,
KEPALA BPKAD PROVINSI JAWA TENGAH

Slamet, Ak.
Pembina Utama Madya
NIP.19660215 198603 1 001

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Sriwijaya Nomor 29 Tegalsari, Kec. Candisari, Semarang Kode Pos 50614
Telepon 024 -8311174 Faksimile 024 – 8311172 laman http: // www.jatengprov.go.id
surat elektronik bpkad@jatengprov.go.idSemarang 50243

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Tahun: 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Terget
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah Yang Sesuai Kaidah Perundang-Undangan	Persentase keselarasan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	100%
		Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun	100%
		Persentase Realisasi APBD	93,75%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,1 (angka)
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	1,29 (angka)
3	Meningkatnya jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai peraturan perundang-undangan	100%

Semarang, Januari 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

SLAMET, AK
Pembina Utama Madya
NIP. 19660215 198603 1 001